

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI WILAYAH KEPULAUAN: TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN

Oleh

Ali Hadi La Dimuru¹, La Madjid²

^{1,2}STIA Abdul Azis Kataloka Ambon

Email: ¹hadiladimuru02@gmail.com, ²lamadjid75@gmail.com

Article History:

Received: 14-11-2025

Revised: 21-11-2025

Accepted: 17-12-2025

Keywords: Implementasi
Kebijakan, Wilayah
Kepulauan, Pelayanan
Publik, Partisipasi
Masyarakat

Abstract: Wilayah kepulauan di Indonesia menghadapi tantangan unik dalam implementasi kebijakan publik yang berbeda dengan wilayah daratan. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan publik di wilayah kepulauan dengan fokus pada aspek konektivitas, pelayanan dasar, dan pengelolaan sumber daya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap berbagai implementasi kebijakan di wilayah kepulauan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di wilayah kepulauan menghadapi kendala geografis, keterbatasan infrastruktur, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Faktor-faktor kunci keberhasilan implementasi meliputi komitmen pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan adaptasi kebijakan terhadap kondisi lokal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan terintegrasi untuk wilayah kepulauan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan publik. Wilayah kepulauan yang tersebar dengan karakteristik geografis yang unik memerlukan pendekatan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kondisi geografis yang terpisah-pisah, aksesibilitas yang terbatas, serta keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam mencapai pemerataan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Menurut Subianto (2020:87) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan kebijakan. Dalam konteks wilayah kepulauan, implementasi kebijakan menghadapi kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan.

Permasalahan implementasi kebijakan di wilayah kepulauan mencakup berbagai sektor, mulai dari pelayanan kesehatan, pengelolaan lingkungan, konektivitas transportasi, hingga pembangunan daerah tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

implementasi kebijakan publik di wilayah kepulauan Indonesia dengan mengidentifikasi tantangan, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam yang berjudul: "Analisis Implementasi Kebijakan Publik Di Wilayah Kepulauan: Tantangan dan Strategi Pengelolaan".

LANDASAN TEORI

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang menghubungkan antara perumusan kebijakan dengan hasil yang diharapkan. Menurut Subianto (2020: 92) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan kebijakan dalam rangka mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai faktor kontekstual yang melingkupinya.

Dalam konteks implementasi kebijakan, terdapat beberapa model yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis. Model implementasi top-down menekankan pada peran pembuat kebijakan dalam mengarahkan proses implementasi, sedangkan model bottom-up lebih memperhatikan peran implementor di lapangan dan kondisi lokal. Untuk wilayah kepulauan, pendekatan yang menggabungkan kedua model tersebut seringkali lebih efektif mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

1. Karakteristik Wilayah Kepulauan

Wilayah kepulauan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari wilayah daratan. Menurut Dirangga, Lengkong, et al. (2021:3) mengemukakan bahwa daerah kepulauan menghadapi tantangan aksesibilitas yang tinggi, keterbatasan infrastruktur dasar, serta kesulitan dalam koordinasi antar wilayah. Kondisi geografis yang terpisah-pisah menyebabkan biaya pembangunan dan pelayanan publik menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah yang terpusat.

Karakteristik wilayah kepulauan juga berpengaruh terhadap pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Ketergantungan terhadap transportasi laut sebagai sarana konektivitas utama menjadi faktor determinan dalam mobilitas penduduk dan distribusi barang dan jasa. Sedangkan menurut Naufal (2024:125) menyebutkan bahwa konektivitas antar pulau melalui transportasi laut menjadi kunci dalam mengintegrasikan wilayah kepulauan dan memfasilitasi akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi yang relevan dengan implementasi kebijakan publik di wilayah kepulauan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan utama dari berbagai studi yang dikaji.

Fokus analisis meliputi tiga aspek utama: (a) tantangan dalam implementasi kebijakan di wilayah kepulauan, (b) faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, dan (c) strategi dan best practices yang telah diterapkan di berbagai wilayah kepulauan Indonesia. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan cross-checking terhadap berbagai literatur yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan Implementasi Kebijakan di Wilayah Kepulauan

Implementasi kebijakan publik di wilayah kepulauan menghadapi berbagai tantangan kompleks yang bersifat multidimensional. Tantangan utama yang teridentifikasi meliputi aspek geografis, infrastruktur, sumber daya manusia, dan koordinasi kelembagaan.

a. Tantangan Geografis dan Aksesibilitas

Kondisi geografis kepulauan menjadi hambatan fundamental dalam implementasi kebijakan. Menurut Dirangga, Lengkong, et al. (2021:8) menemukan bahwa kondisi geografis Pulau Marampit yang terpencil dan berbatasan langsung dengan negara lain menyebabkan kesulitan dalam penyediaan pelayanan dasar dan pengawasan program pembangunan. Jarak yang jauh dari pusat pemerintahan, kondisi laut yang tidak selalu kondusif, serta keterbatasan moda transportasi menyebabkan distribusi sumber daya dan akses pelayanan menjadi tidak merata.

Selain itu, menurut Naufal (2024:128) menambahkan bahwa keterbatasan konektivitas antar pulau berdampak pada tingginya biaya transportasi dan waktu tempuh yang panjang, sehingga menghambat mobilitas penduduk dan distribusi barang. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi tetapi juga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan layanan pemerintahan lainnya.

b. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas

Infrastruktur yang terbatas merupakan kendala signifikan dalam implementasi kebijakan di wilayah kepulauan. Menurut Winarsa, Suryoputro et al. (2020:156) mengidentifikasi bahwa Puskesmas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat, dan peralatan medis yang memadai. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Keterbatasan infrastruktur juga mencakup aspek energi listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang masih menjadi permasalahan di banyak wilayah kepulauan. Kondisi ini tidak hanya menghambat pelayanan publik tetapi juga membatasi peluang pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia pelaksana kebijakan di wilayah kepulauan masih menjadi tantangan. Menurut Winarsa, Suryoputro, et al. (2020:158) menyebutkan bahwa kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter dan tenaga medis spesialis, menjadi kendala utama dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. Faktor lokasi yang terpencil, minimnya insentif, dan terbatasnya fasilitas pendukung menyebabkan sulitnya merekrut dan mempertahankan tenaga profesional di wilayah kepulauan.

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Program

Menurut Dirangga, Lengkong, et al. (2021:11) mengungkapkan bahwa koordinasi antar instansi pemerintah dalam pengelolaan pembangunan daerah kepulauan masih belum optimal. Tumpang tindih program, kurangnya sinkronisasi anggaran, dan lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tidak efisien dan efektif.

2. Implementasi Kebijakan Spesifik di Wilayah Kepulauan

a. Kebijakan Pelayanan Kesehatan

Implementasi kebijakan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan menghadapi tantangan khusus. Menurut Winarsa, Suryoputro, et al. (2020: 162) menganalisis bahwa meskipun pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan melalui penyediaan Puskesmas DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan), namun efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan tenaga kesehatan, fasilitas, dan sistem rujukan yang belum optimal.

Strategi yang diterapkan meliputi pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan, pengadaan sarana transportasi kesehatan berupa kapal ambulans, serta program kunjungan tim kesehatan mobile. Namun demikian, keberlanjutan program masih bergantung pada komitmen anggaran dan dukungan politik dari pemerintah daerah.

b. Kebijakan Konektivitas dan Transportasi

Konektivitas menjadi isu krusial dalam pembangunan wilayah kepulauan. Menurut Naufal (2024:132) meneliti implementasi kebijakan pemerintah terhadap konektivitas antar pulau di Tambelan dan menemukan bahwa meskipun terdapat program tol laut dan subsidi transportasi, namun frekuensi dan kualitas layanan masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketergantungan pada cuaca dan kondisi laut seringkali menyebabkan ketidakpastian jadwal transportasi.

Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan konektivitas melalui pembangunan dermaga, pengadaan kapal perintis, dan pemberian subsidi tarif transportasi. Selain itu, menurut Naufal (2024:135) mencatat bahwa partisipasi sektor swasta dalam penyediaan transportasi laut masih terbatas karena pertimbangan ekonomi dan risiko usaha yang tinggi.

c. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Wilayah kepulauan yang identik dengan wilayah pesisir menghadapi permasalahan pengelolaan sampah laut. Menurut Riksfardini (2023:78) menganalisis implementasi kebijakan penanganan sampah laut di wilayah pesisir Muara Angke dan mengidentifikasi bahwa koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat masih lemah. Keterbatasan infrastruktur pengolahan sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan pencemaran laut terus meningkat.

Penerapan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media dianggap sebagai strategi yang potensial. Selanjutnya, menurut Riksfardini (2023:82) menyatakan bahwa kolaborasi multi-stakeholder dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah laut, meskipun masih memerlukan penguatan kapasitas dan komitmen dari masing-masing pihak.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi

a. Komitmen dan Kapasitas Pemerintah Daerah

Menurut Subianto (2020:115) menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah menjadi faktor determinan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks wilayah kepulauan, komitmen ini diwujudkan melalui alokasi anggaran yang memadai, pembangunan infrastruktur pendukung, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya, menurut Dirangga, Lengkong, et al. (2021:13) menemukan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi hambatan dalam menyediakan anggaran yang cukup untuk pembangunan wilayah kepulauan. Ketergantungan pada transfer fiskal dari pemerintah pusat menyebabkan program pembangunan menjadi tidak berkelanjutan ketika dukungan pusat berkurang.

b. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan di wilayah kepulauan. Maunde, Posumah, et al. (2021:167) meneliti implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 dan menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan program. Masyarakat yang aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program cenderung memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap kebijakan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat lokal juga penting untuk memastikan keberlanjutan program. Menurut Maunde, Posumah, et al. (2021:170) menyarankan bahwa pemerintah perlu mengembangkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan.

c. Adaptasi Kebijakan terhadap Konteks Lokal

Keunikan setiap wilayah kepulauan memerlukan adaptasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal. Menurut Subianto (2020:124) mengemukakan bahwa kebijakan yang bersifat top-down tanpa mempertimbangkan kondisi lokal seringkali menghadapi resistensi dan kegagalan dalam implementasi. Pendekatan yang lebih fleksibel dan partisipatif memungkinkan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lokal.

Sementara menurut Naufal (2024:138) memberikan contoh bahwa dalam kebijakan konektivitas, perlu mempertimbangkan kondisi geografis spesifik, pola migrasi penduduk, dan kebutuhan ekonomi lokal dalam menentukan rute dan frekuensi transportasi. Pendekatan one-size-fits-all tidak akan efektif untuk mengatasi keberagaman kondisi antar wilayah kepulauan.

d. Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

Implementasi kebijakan di wilayah kepulauan memerlukan koordinasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan. Riksfardini (2023:85) menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan. Mekanisme koordinasi yang jelas, pembagian peran yang tegas, dan sistem komunikasi yang efektif menjadi prasyarat keberhasilan.

4. Strategi Peningkatan Efektivitas Implementasi Kebijakan

a. Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas

Investasi infrastruktur menjadi prioritas utama untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di wilayah kepulauan. Menurut Naufal (2024:141)

merekomendasikan pembangunan dermaga, peningkatan armada transportasi laut, dan pengembangan sistem informasi transportasi untuk meningkatkan konektivitas antar pulau. Infrastruktur yang memadai akan memfasilitasi distribusi sumber daya dan akses pelayanan kepada masyarakat.

b. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Menurut Winarsa, Suryoputro, et al. (2020:165) menyarankan perlunya program khusus untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan tenaga profesional di wilayah kepulauan. Pemberian insentif khusus, pengembangan karir, dan penyediaan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan daya tarik bekerja di wilayah kepulauan.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Menurut Subianto (2020:178) menekankan pentingnya sistem monitoring dan evaluasi yang robust untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana. Dalam konteks wilayah kepulauan, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi monitoring jarak jauh dan pelaporan real-time dari implementor di lapangan.

d. Integrasi Kebijakan dan Pendekatan Holistik

Menurut Purnama & Chotib (2022:95) menggarisbawahi perlunya integrasi antara berbagai kebijakan sektoral untuk menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih program. Pendekatan holistik yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dampak kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan publik di wilayah kepulauan menghadapi tantangan kompleks yang berbeda dari wilayah daratan. Tantangan utama meliputi kondisi geografis yang terpencil, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal.
2. Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di wilayah kepulauan mencakup: (a) komitmen dan kapasitas pemerintah daerah dalam alokasi sumber daya dan pembangunan infrastruktur, (b) partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat lokal, (c) adaptasi kebijakan terhadap konteks dan kebutuhan lokal, serta (d) koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan.
3. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di wilayah kepulauan, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi: penguatan infrastruktur dan konektivitas, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta integrasi kebijakan dengan pendekatan holistik. Pendekatan yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil kajian penelitian ini, maka dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mengalokasikan dana khusus (special allocation fund) untuk pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan dengan mekanisme yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

2. Pengembangan skema insentif khusus bagi tenaga profesional yang bertugas di wilayah kepulauan, termasuk tunjangan daerah khusus, program percepatan karir, dan jaminan pendidikan bagi keluarga.
3. Pembentukan badan koordinasi khusus untuk wilayah kepulauan yang memiliki kewenangan lintas sektoral untuk memastikan sinergi program dan efisiensi penggunaan sumber daya.
4. Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akses pelayanan publik dan memperkuat sistem monitoring implementasi kebijakan di wilayah kepulauan yang terpencil.
5. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi model implementasi kebijakan yang paling efektif untuk berbagai tipologi wilayah kepulauan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andalus, M. K., & Djuyandi, Y. 2022. Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Alutsista RI Dalam Kerangka Kebijakan Minimum Essential Force (MEF) Pada Tahun 2020-2024. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*.
- [2] Dirangga, E., Lengkong, F., et al. 2021. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Daerah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) Di Pulau Marampit Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*.
- [3] Manurung, L. 2020. Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*.
- [4] Maunde, R., Posumah, J., et al. 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- [5] Naufal, M. N. 2024. Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Konektivitas Antar Pulau Melalui Transportasi Laut di Tambelan. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*.
- [6] Purnama, S. J., & Chotib, C. 2022. Analisis kebijakan publik pemindahan ibu kota negara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*.
- [7] Riksfardini, M. 2023. Analisis implementasi kebijakan penanganan sampah laut di wilayah pesisir muara angke jakarta utara. *Pentahelix: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- [8] Siregar, H. Y., Akim, A., & Djuyandi, Y. 2023. Analisis Kebijakan Pengawasan Program Dan Kegiatan Kepolisian Di Polres Sorong Selatan. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*.
- [9] Subianto, A. 2020. *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*.
- [10] Winarsa, N., Suryoputro, A., et al. 2020. Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan Dan Kepulauan (DTPK) Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *VISI KES: Jurnal Kesehatan Masyarakat*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN